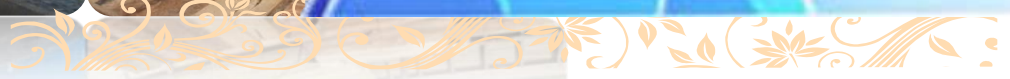
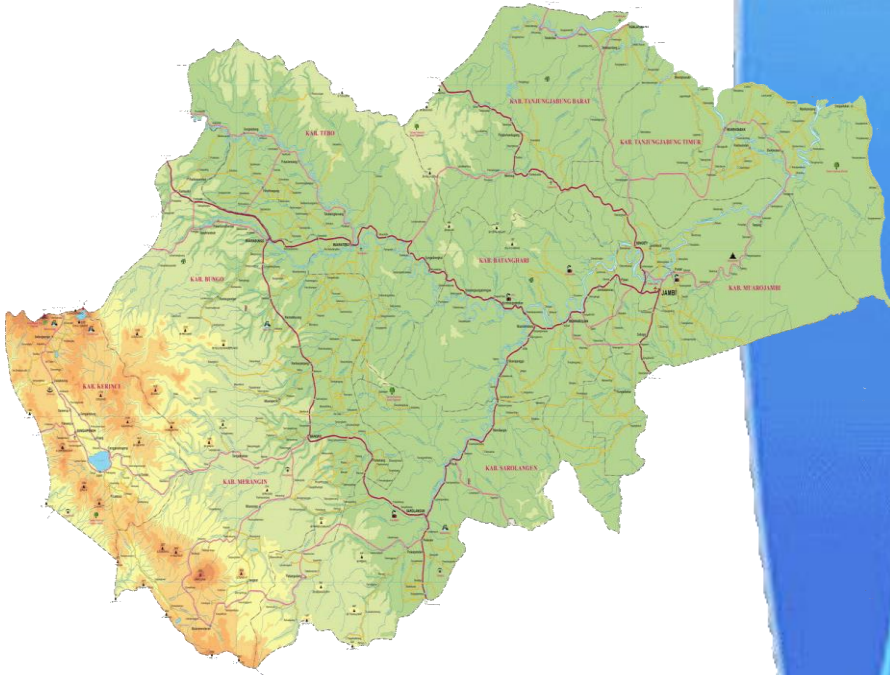


# RENJA

## DINAS PERIKANAN TAHUN 2018 PERUBAHAN



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke Khadirat Ilahi Robbi, karena atas Rahmat dan Karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Perikanan Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2019.

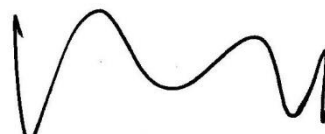
Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2019 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah, Tujuan, Sasaran yang menggambarkan Pencapaian Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dana Indikatif beserta sumbernya.

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan sebagai Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program / kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2019 dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui Rencana Kerja pula diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.

Kuala Tungkal,

2019

**Pit. KEPALA DINAS**



**Ir. H. ERWIN**

**Pembina Utama Muda**

**NIP. 19611016 199303 1 001**

## DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	3
1.3. Maksud dan Tujuan .....	5
1.4. Sistematika Penulisan .....	6
<b>BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN 2019</b> .....	7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD sampai dengan Mei 2019 .....	7
2.2. Prediksi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2019) .....	13
2.3. Analisis Kinerja Pelayanan OPD .....	17
2.4. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD .....	23
2.5. Review terhadap Rancangan Awal RKPD .....	28
<b>BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN</b> .....	30
3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional .....	30
3.2. Tujuan dan sasaran Rancangan Renja SKPD .....	31
3.3. Program dan Kegiatan .....	31
<b>BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERUBAHAN OPD T.A. 2019</b> .....	42
<b>BAB IV. PENUTUP</b> .....	45

## DAFTAR TABEL

*Halaman*

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Diskan dan Pencapaian Renstra Dinas Perikanan Sampai Dengan Mei 2019 .....	8
Tabel 2.2. Prediksi Program dan Kegiatan OPDTahun 2018 .....	14
Tabel 2.3. Pencapaian Kinerja OPD.....	19
Tabel 3.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2019 dan Perubahan 2019 .....	36
Tabel 4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Perubahan OPD Tahun 2019 .....	43

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
DINAS PERIKANAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2019**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari *korupsi, kolusi dan nepotisme* merupakan perwujudan dari *Good Governance*, dengan memerlukan pengembangan dan penerapan sistem perencanaan yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate*.

Rencana Kerja (Renja) adalah aktivitas analisis dan pengambilan keputusan di depan untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan di masa yang akan datang. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategi (RENSTRA) Dinas Perikanan serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang telah disusun.

Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) milik Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang beralamat di Jalan Letkol Polisi Toegino Kuala Tungkal. Dinas ini mempunyai Tugas untuk melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Kelautan dan Perikanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Program dan kegiatan yang berkaitan dengan Kelautan dan Perikanan perlu direncanakan dengan cermat agar dapat bersinergi dengan program pembangunan lainnya secara berkesinambungan, berwawasan lingkungan, dan berbasis masyarakat. Dengan demikian, penyelenggaraan program Kelautan dan Perikanan harus dimantapkan secara berkelanjutan melalui integrasi dan koordinasi yang terus menerus.

Penyusunan renja dan perubahan renja bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD. Adapun perubahan renja perangkat daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja

serta penyerapan anggaran pada renja perangkat daerah sampai dengan triwulan II menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah yang berdampak terhadap pagu yang mengakibatkan terjadinya penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, penambahan atau penghapusan kegiatan;
2. Faktor lain yang mengakibatkan perlunya dilakukan pergeseran kegiatan, perubahan lokasi dan/atau kelompok sasaran dan penghapusan kegiatan;
3. Adanya kegiatan baru/alternatif yang harus ditampung dalam perubahan RKPD Tahun 2019; dan/atau
4. Adanya keadaan luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen).

Disamping beberapa pertimbangan tersebut, mengingat perubahan renja perangkat daerah merupakan penjabaran dari renstra perangkat daerah maka program dan kegiatan yang ada di perubahan renja perangkat daerah harus tercantum dalam renstra perangkat daerah tahun rencana. Program/kegiatan alternative dan/atau baru dapat digunakan jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Tidak bisa ditunda karena dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah maupun masyarakat;
2. dalam rangka mempercepat capaian target sasaran Renstra OPD;
3. adanya kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas nasional yang mendukung percepatan pembangunan daerah; dan/atau
4. dilakukan jika kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sebelumnya belum memberikan keluaran dan hasil yang sesuai dengan sasaran Renstra OPD.

Penyusunan Rancangan perubahan renja perangkat daerah Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung jabung Barat Tahun 2019 dimulai dari pengumpulan Data dan analisis permasalahan yang menjadi dasar penyusunan Rancangan Perubahan RKPD kabupaten Tanjung jabung Barat, hasil



evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan triwula II, masalah yang dihadapi serta usulan program serta kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2019. Rancangan perubahan renja tersebut kemudian melalui proses verifikasi dengan tujuan untuk memastikan indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah maupun program dan kegiatan prioritas pada rancangan perubahan RKPD telah sepenuhnya tercantum pada perubahan renja perangkat daerah terkait. Setelah melalui proses verifikasi dan penyesuaian akhir dengan perubahan RKPD yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati, maka rancangan perubahan renja perangkat dapat ditetapkan oleh kepala perangkat daerah setelah mendapat pengesahan dari Bupati.

## 1.2. Landasan Hukum

Dalam melaksanakan tugas pembangunan sektor Kelautan dan Perikanan, Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat berlandaskan kepada :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko, Bungo, Tebo, Batanghari, Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755).
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tanjung Jabung Barat;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013–2033;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005 – 2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 – 2021(Lembaran Daerah Kabu[paten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 2);



16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6);
17. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 65 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja SKPD;
18. Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1. Maksud**

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 disusun dengan maksud untuk menyediakan acuan resmi bagi Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam rangka menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP) Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2019.

#### **1.3.2. Tujuan**

Tujuan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 adalah untuk merumuskan prioritas program dan kegiatan serta pagu indikatifnya yang akan dilaksanakan Tahun 2019 sehingga tercipta sinergisitas dalam pelaksanaan pemerintahan.

### **1.4. Sitematika Penulisan**

Sistematika Penulisan Rancangan Renja Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

#### **1. BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Landasan Hukum.
- 1.3. Maksud dan Tujuan.

1.4. Sistematika Penulisan.

## **2. BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN KINERJA DINAS PERIKANAN TAHUN 2019**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perikanan Tahun 2019 dan Capaian indikator sampai dengan Mei 2019.
- 2.1. Prediksi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (Tahun 2019).
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.
- 2.4. Review terhadap Rancangan RKPD.
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

## **3. BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

- 3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional.
- 3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah.
- 3.3. Program dan Kegiatan

## **4. BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

## **5. BAB V. PENUTUP**

Berisi uraian Penutup, Berupa :

1. catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediannya anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
2. Kaidah-kaidah pelaksanaannya.
3. Rencana Tindak Lanjut.

## **6. LAMPIRAN**

# **BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN KINERJA DINAS PERIKANAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2019**

## **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perikanan Tahun 2019 dan Capaian Indikator sampai dengan Mei Tahun 2019**

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun

2019 sampai dengan Semester I adalah sebagai berikut :

1. Dari 9 (sembilan) program dan 35 (tiga puluh tiga) kegiatan yang dianggarkan pada Tahun 2019 maka prosentase kegiatan yang telah dilaksanakan belum mencapai target yang diharapkan, berdasarkan Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan (LPPK) per Mei 2019, serapan keuangan Dinas Perikanan baru mencapai 14,58% dari total anggaran sebesar Rp. 4.832.591.635,- (empat Milyar delapan ratus tiga puluh dua juta lima ratus Sembilan satu ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah) dan capaian fisik baru mencapai 19,37%, hal ini dikarenakan kegiatan fisik sampai dengan Mei 2019 baru dalam proses pengadaan da nada sebahagian keiatan fisik yang akan dirubah kode rkeningnya, karena tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Secara umum faktor penyebab tidak/kurang tercapainya target hasil/keluaran untuk kegiatan yang telah direncanakan dikarenakan keterbatasan SDM aparatur pada Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung jabung Barat, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Disamping itu juga adanya ketentuan peraturan perundangan yang baru berlaku, sehingga beberapa kegiatan harus menyesuaikan aturan baru tersebut.

Adapun evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sampai dengan Mei 2019 adalah sebagaimana tergambar dalam Tabe 2.1. sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Perikanan dan**  
**Pencapaian Renstra Dinas Perikanan Sampai dengan Mei 2019**  
**Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

Kode	Program dan Kegiatan DPK	Indikator Kinerja Program (Outcome) / (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target Program dan Kegiatan Renja DPK Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja DPK Tahun 2018	Realisasi Renja DPK Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Meningkatnya Tata Kelola Perkantoran yang Baik, transparan dan akuntable	80 %	80 %	80 %	80 %	100	80 %	80 %	100,00
01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Bulan dalam Penyediaan Surat Menyurat	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	100	12 Bln	5 Bln	100,00
02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Jumlah Bulan dalam Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan Listrik	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	100	12 Bln	5 Bln	100,00
07.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah aparatur Teknis yang mendapatkan Honorarium	12 Bln	27 OB	27 OB	27 OB	100	12 Bln	5 Bln	100,00
08.	Penyediaan jasa kebersihan	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 Bln	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bln	5 Bulan	100,00
10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Macam Penyediaan alat tulis kantor	12 Bln	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bln	5 Bulan	100,00
11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Bulan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	100	12 Bln	5 Bln	100,00
12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Komponen Listrik	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	100	12 Bln	5 Bln	100,00
15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	100	12 Bln	5 Bln	100,00

	17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Bulan Tersedianya makan dan minum rapat	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	100	12 Bln	5 Bln	100,00
	18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah Bulan Penyediaan SPPD dalam/luar daerah	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	100	12 Bln	5 Bln	100,00
	<b>02.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>100 %</b>	<b>33,33 %</b>	<b>100 %</b>	<b>99,20 %</b>	<b>99,20</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100,00</b>
	09	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	3 Unit	0 Macam	7 macam	6 Macam	85,71	4 Unit	1 Unit	45,75
	13	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor	4 Unit	0 Unit	9 Unit	8 Unit	98,00	2 Unit	0 Unit	35,27
	20	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Persentase Pemeliharaan Gedung Kantor	100 %	100 %	100 %	100 %	100	1 Unit	0 %	100,00
	22	Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang mendapatkan Pemeliharaan	39 Unit	32 Unit	32 Unit	27 Unit	100	30 Unit	50 %	100,00
	26	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	Meningkatnya Kenyamanan Bekerja	40 Unit	32 Unit	29 Unit	29 Unit	100	32 Unit	50 %	100,00
	27	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Persentase Rehabilitasi Bangunan Gedung	100 %	0	0	0	0	0 0	0 %	100,00
	<b>03.</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Jumlah pakain dinas yang disediakan</b>	<b>84 Stell</b>	<b>71 Stell</b>	<b>108 Stell</b>	<b>71 Stell</b>	<b>100</b>	<b>64 Stell</b>	<b>64 Stell</b>	<b>35,27</b>
	02.	Pengadaan pakaian dinas berserta Perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta atributnya	84 Stell	71 Stell	71 Stell	71 Stell	100	64 Stell	100 %	35,27
	<b>05.</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur</b>	<b>Persentase Aparatur yang mengikuti Pendidikan Formal/Non Formal</b>	<b>100 %</b>	<b>0 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>23,52</b>
	05.	Pendidikan dan Pelatihan Formal/Non Formal	Persentase Aparatur yang mengikuti Pendidikan Formal/Non Formal	100 %	0 %	100 %	100 %	100	100 %	40 %	100,00
	<b>06.</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Persentase Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Laporan Statistik Tahunan</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>183,33</b>
	01.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kegiatan	Jumlah Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Dokumen Perencanaan	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100	3 Dokumen	70 %	100,00

	17.	Pengumpulan dan Pengolahan Data Statistik	Tersedianya Laporan Statistik Perikanan yang terbaru	10 Buku	10 Buku	10 Buku	10 Buku	100	5 Buku	50 %	100,00
20.		<b>Program Pengembangan Budidaya Perikanan</b>	<b>Produksi Perikanan Budidaya (Ton)</b>	<b>2.417 Ton</b>	<b>4.258,64 Ton</b>	<b>1.934 Ton</b>	<b>1.724,29 Ton</b>	<b>89,20</b>	<b>2.102 Ton</b>	<b>10.501,93 Ton</b>	<b>34,42</b>
	12.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan	Jumlah POKDAKAN yang mendapatkan Bantuan Sarana dan Prasarana Pembudidaya Ikan	10 Kelompok	15 Kelompok	7 Kelompok	7 Kelompok	100	10 Kelompok	3 Kelompok	35,25
			Jumlah UPR yang mendapatkan Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan	2 Kelompok	2 Kelompok	0	0	0	3 Kelompok	0 Kelompok	35,25
	13.	Pengembangan Budidaya Air Tawar dan Air Payau	Tersedianya Bantuan Benih Ikan	450.000 Ekor	550.000 Ekor	800.000 Ekor	800.000 Ekor	100	360.000 Ekor	0 %	32,65
			Tersedianya Bantuan Pakan Ikan	9.000 Kg	7.500 Kg	6.900 Ton	6.900 Ton	100	7.000 Kg	0 %	35,25
	14.	Pengembangan Sumberdaya Manusia Perikanan Budidaya	Jumlah Masyarakat yang mendapatkan pelatihan dan bimbingan teknis pembudidaya ikan yang baik dan berstandar	300 Orang	150 Orang	150 Orang	150 Orang	100	208 Orang	100 Orang	35,25
	15.	Pengembangan UPTD Balai Benih Ikan (BBI) Pembengis dan UPBAP Muara Seberang	Jumlah Produksi Benih Ikan	630.000 Ekor	493.296 Ekor	750.000 Ekor	976.416 Ekor	130,19	550.000 Ekor	38 %	25,45
	16.	Pengawasan Hama Penyakit Ikan dan lingkungan	Terlaksananya Monitoring Hama dan Penyakit Ikan	12 Bulan	0 Bulan	0 Bulan	0 Bulan	0	12 Bulan	5 Bulan	20,00
	17.	Pembinaan dan Penguatan Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN)	Jumlah Kelompok yang mendapatkan pemberdayaan dan legalitas Pembudidaya Ikan	10 Kelompok	8 Kelompok	7 Kelompok	7 Kelompok	100	10 Kelompok	3 Kelompok	35,25
	18.	Pengembangan Kawasan Budidaya Air Tawar dan Air Payau	Terlaksananya Pengembangan Kawasan Budidaya Ikan	2 Lokasi	1 Lokasi	0	0	0	3 Lokasi	1 Lokasi	20,33
21		<b>Program Pengembangan Perikanan Tangkap</b>	<b>Jumlah Produksi Perikanan Tangkap</b>	<b>25.069 Ton</b>	<b>25.121 Ton</b>	<b>21.734 Ton</b>	<b>23.188,6 Ton</b>	<b>106,67</b>	<b>22.790 Ton</b>	<b>96.168,6 Ton</b>	<b>32,97</b>
06		Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap	Tersedianya Armada Penangkapan Ikan	25 Unit	307 Unit	25 Unit	0 Unit	0	20 Unit	352 Unit	35,25
			Tersedianya Alat Tangkap Ikan Ramah Lingkungan	1.000 Paket	700 Paket	400 Paket	0 Paket	0	500 Paket	2.200 Paket	25,87
	07	Pemberdayaa dan Perlindungan Nelayan	Jumlah Masyarakat Nelayan yang mendapatkan Pembinaan dan Perlindungan Nelayan	500 Orang	200 Orang	250 Orang	250 Orang	100	400 Orang	1.350 Orang	35,25
	08	Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap (DAK)							30 Paket	0 %	100
23		<b>Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan</b>	<b>Jumlah Kinsumsi Ikan</b>	<b>34,00 Kg/Kpt/Thn</b>	<b>32,80 Kg/Kpt/Thn</b>	<b>33,13 Kg/Kpt/Thn</b>	<b>33,35 Kg/Kpt/Thn</b>	<b>115</b>	<b>33,45 Kg/Kpt/Thn</b>	<b>34 %</b>	<b>100</b>
	10	Pembinaan Usaha dan Pemasaran Hasil Perikanan	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Peningkatan SDM Pelaku Usaha Perikanan	70 %	55 %	65 %	65 %	100	70 %	25 %	33,00



	12	Promosi dan Publikasi Kegiatan Sektor Perikanan dan Kelautan	Persentase Terlaksananya Promosi dan publikasi Kegiatan Perikanan (Pameran HUT Tanjung Jabung Barat, Jambi, Expo, Pameran Hari Krida Pertanian, Pameran diluar Provinsi, Publikasi Media dan Pameran Lainnya	100 %	100 %	100 %	100 %	100	75 %	15 %	35,25
	25	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan</b>									
	01	Pembinaan dan Kelembagaan dan Peningkatan SDM Pelaku Usaha Perikanan	Terlaksananya Pembinaan dan Peningkatan SDM Pelaku Usaha Perikanan	10 Kelompok	7 Kelompok	7 Kelompok	7 Kelompok	100	10 Kelompok	3 Kelompok	35,25
	02	Pembinaan dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan dan SDI	Persentase Meningkatnya Pengawasan Mutu Hasil Perikanan dan kelestarian Sumberdaya Ikan	25 %	15 %	30 %	30 %	100	25 %	5 %	25,00

*Keterangan : Data sampai dengan Mei 2019*

Dilihat pada Tabel 2.1 di atas pelaksanaan Program/Kegiatan Dinas Perikanan mengacu pada Renja Dinas Perikanan Tahun 2019 belum sesuai target, walau demikian masih ada catatan –catatan penting yang harus dibenahi dalam pelaksanaan program/kegiatan.

Dalam pelaksanaan program/kegiatan tidak semuanya berjalan dengan baik, masih ada permasalahan-permasalahan internal maupun eksternal yang diluar perkiraan, factor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program /kegiatan Dinas Perikanan dilihat dari 2 (dua) factor tersebut adalah:

A. Faktor Internal

- a. Masih adanya tumpang tindih pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- b. Adanya mutasi Pejabat, sehingga berpengaruh pada pelaksanaan program/kegiatan; dan
- c. Masih kurangnya koordinasi antar instansi terkait dalam pelaksanaan pembangunan Kelautan dan Perikanan.

B. Faktor Eksternal

- a. Kondisi alam yang tidak bisa diperkirakan;
- b. Adanya perubahan harga barang dipasaran;
- c. Adanya kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah yang berubah;
- d. Sumberdaya manusia yang masih kurang kompetitif.

Secara umum hambatan/masalah utama yang dihadapi dalam rangka pencapaian sasaran program/kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah :

1. Kurang koordinasinya pihak Dinas dengan pihak ketiga (Perencanaan) sehingga terjadi lambatnya beberapa pekerjaan di Lingkungan Dinas Perikanan.
2. Masih kurang aparatur yang ada di Dinas Perikanan, sehingga kinerja Dinas Kurang maksimal.
3. Masih kurangnya sinkronisasi antara pihak dinas dan masyarakat, sehingga pembangunan perikanan masih terpaku pada usaha perikanan tangkap, padahal pengembangan budiadaya perikanan maupun pengolahan mempunyai potensi yang sangat besar untuk dikembangkan, akan tetapi mulai tahun

2013 kedua sektor tersebut mulai dikembangkan yang pendanaanya bersumber dari APBD I, APBD II dan APBN melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Tugas Pembantuan (TP).

4. Masih banyaknya Rekanan (Kontraktor) yang bekerja tidak profesional, sehingga ada sebagian pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan jadwal penetapan yang telah ditetapkan oleh Dinas.

Untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut dalam pencapaian kinerja maka :

1. Koordinasi perlu dilakukan antar Dinas (Pemda) dan Masyarakat, sehingga ada persepsi yang sama agar supaya pembangunan Bidang Kelautan dan Perikanan dapat tercapai tepat sasaran.
2. Memaksimalkan Aparatur Dinas yang ada, dengan cara melaksanakan tupoksi sesuai latar belakang penempatannya.
3. Harus lebih diperhatikan lagi pengembangan budidaya dan pengolahan, karena berdasarkan Undang-Undang nomor 23 tentang Pemerintahan daerah, kewenangan Kabupaten dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dialihkan kepada Pemerintah Provinsi.
4. Perlu adanya penunjukan Rekanan (Kontraktor) yang profesional, sehingga tidak ada lagi keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan.

## **2.2. Prediksi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (Tahun 2019)**

Prediksi pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun berjalan (2019) dapat dilihat dalam Tabel

2.2 dibawah ini :

**Tabel 2.2**  
**Prediksi Program dan Kegiatan Dinas Perikanan tahun 2019**

1	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Program dan Kegiatan Renja Diskan Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
					Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun berjalan (Tahun-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renja (%)
2	3	4	5	6	7	
<b>I. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>						
1.	Penyediaan jasa Surat Menyurat	Diskan Kab. Tanjab Barat	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100%
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Diskan Kab. Tanjab Barat	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100%
3.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Diskan Kab. Tanjab Barat	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100%
4.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Diskan Kab. Tanjab Barat	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100%
5.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Diskan Kab. Tanjab Barat	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100%
6.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Diskan Kab. Tanjab Barat	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100%
7.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Diskan Kab. Tanjab Barat	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100%
8.	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Diskan Kab. Tanjab Barat	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100%
9.	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Diskan Kab. Tanjab Barat	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100%
10.	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Diskan Kab. Tanjab Barat	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100%
<b>II. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PARASARANA APARAT</b>						
11..	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Diskan Kab. Tanjab Barat	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	3 Unit	3 Unit	100%
12	Pengadaan peralatan gedung kantor	Diskan Kab. Tanjab Barat	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	2 Unit	2 Unit	100%
13	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Diskan Kab. Tanjab Barat	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	12 Bulan	12 Bulan	100%
14	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	DPK Kab. Tanjab Barat	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	30 Unit	30 Unit	100%
15	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Diskan Kab. Tanjab Barat	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	0 Unit	0 Unit	100%
16	Rehabilitasim Sedang/Berat Gedung Kantor	Diskan Kab. Tanjab Barat	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	41 Unit	41 Unit	100%

<b>III.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>					
17	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Diskan Kab. Tanjab Barat	Meningkatnya disiplin aparatur	73 Stell	73 Stell	100%
<b>IV.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR</b>					
18	Pengembangan SDM	DPK Kab. Tanjab Barat	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	6 OK	6 OK	100%
<b>V.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN, CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>					
19.	Pengumpulan Dan Pengolahan Data-Data Statistik	DPK Kab. Tanjab Barat	Terlaksananya Pengumpulan dan Pengolahan Data Statistik Perikanan	15 Buku	15 Buku	100%
20.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	DPK Kab. Tanjab Barat	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja	5 Dok	5 Dok	100%
<b>VI.</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN</b>					
21	Penyediaan Sarana dan Prasarana Budidaya ikan	Ds. Muara Seberang, Ds. Mekar Alam, Ds. Sungai Dualap, Ds. Tlk. Kulbi, Ds. Dataran Kempas dan Ds. Sri Agung	Jumlah POKDAKAN yang Mendapatkan Bantuan Sarana dan Prasarana Pembudidaya Ikan, Jumlah PR yang Mendapatkan Sarana dan Prasarana Ikan	10 Kelompok	10 Kelompok	100%
22	Pengembangan Budidaya Air Tawar dan air Payau	Kec. Betara, Kec. Batang Asam, Kec. Renah Mendaluh dan Kec. Tungkal Ulu	Tersedianya Bantuan Benih Ikan, Tersedianya Bantuan Pakan Ikan	360.000/7.000 Ekor/Kg	360.000/7.000 Ekor/Kg	100%
23	Pengembangan Sumberdaya Manusia Perikanan Budidaya	Kec. Tungkal Ilir, Kec. Tebing Tinggi dan Kec. Batang Asam	Terlaksananya Pengembangan Sumberdaya Manusia Perikanan Budidaya	300 Orang	300 Orang	100%
24	Pengembangan UPTD Balai Benih Ikan (BBI) Pembengis dan UPBAP Tj. Labu	Ds. Pembengis dan Tj. Labu	Jumlah Produksi Banih Ikan	630.000 Ekor	630.000 Ekor	100%
25	Kajian Kawasan dan Penerapan Teknologi dalam Pengembangan Kawasan Budidaya Air Tawar, Payau dan Laut	Kec. Tungkal Ilir, Kec. Tebing Tinggi, Kec. Batang Asam dan Kec. Tungkal Ulu	Terlaksananya Monitor Hama dan Penyakit Ikan	12 Bulan	12 Bulan	100%
26	Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan POKDAKAN	Kec. Batang Asam, Kec. Betara, Kec. Seberang Kota dan Kec. Tebing Tinggi	Terlaksananya Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan POKDAKAN	10 Kelompok	10 Kelompok	100%
27	Pengembangan Kawasan Budidaya Air Tawar dan dan Air Payau	Kec. Kuala Betara, Kec. Seberang Kota dan Kec. Tungkal Ilir	Terlaksananya pengembangan kawasan budidaya ikan	2 Lokasi	2 Lokasi	100%
28	Pengembangan Budidaya Air Tawar dan Air Payau	Kec. Kuala Betara, Kec. Seberang Kota dan Kec. Tungkal Ilir	Tersedianya percontohan budidaya udang/ikan	7 Paket	7 Paket	100%
<b>VIII.</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP</b>					
29	Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap	Kec. Tungkal Ilir, Kec. Kuala Betara, Kec. Bram Itam dan Kec. Tungkal Ulu	Tersedianya Armada Penangkapan Ikan, Tersedianya Alat Tangkap Ikan Ramah Lingkungan Ikan	10/600/450/ Unit/Kg/Piece	2.160.383.900	100%
30	Pemberdayaan dan Perlindungan Nelayan	Kec. Tungkal Ilir dan Kec. Seberang Kota, Kec. Kuala Betara dan Kec. Pengabuan	Terlaksananya Pemberdayaan dan Perlindungan Nelayan	300 Orang	300 Orang	100%
31	Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap (DAK)	Kec. Tungkal Ilir dan Kec. Seberang Kota, Kec. Kuala Betara dan Kec. Pengabuan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap	30 Paket	30 Paket	100%

						100%
<b>PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PEMASARAN PRODUSKI PERIKANAN</b>						
32	Pembinaan Usaha dan Pemasaran Hasil Perikanan	Kec. Tungkal Ilir dan Kec. Seberang Kota, Kec. Kuala Betara dan Kec. Pengabuan	Persentase mutu dan diversifikasi produk perikanan	70 %	70 %	100%
33	Promosi dan Publikasi Kegiatan Sektor Perikanan dan Kelautan	Dalam Kabupaten, dalam provinsi Jambi dan Luar Provinsi Jambi	Terlaksananya Kegiatan Promosi Hasil Perikanan	8 Kegiatan	8 Kegiatan	100%
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>						
34	Pembinaan Kelembagaan dan Peningkatan SDM Pelaku Usaha Perikanan	Kec. Tungkal Ilir, Kec. Kuala Betara dan BBPPI Semarang	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Peningkatan SDM Pelaku Usaha Perikanan	4 Kelompok	4 Kelompok	100%
35	Pembinaan Pelestarian Sumberdaya Ikan	Kec. Tungkal Ilir, Kec. Renah Mendaluh dan Kec. Tebing Tinggi	Persentase Meningkatnya Pengawasan Mutu Hasil Perikanan dan Kelestarian Sumberdaya Ikan	1 Kelompok dan 50.000 ribu ekor	1 Kelompok dan 50.000 ribu ekor	100%



Dilihat dari Tabel 2.2 diatas dapat menjelaskan bahwa jumlah program bertambah dua dari tahun sebelumnya (tahun 2018), yaitu Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan dan Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, sedangkan Kegiatan kegiatan Dinas Perikanan tidak ada yang berkurang dibanding dengan tahun sebelumnya, akan tetapi ada pergeseran kegiatan dari Kegiatan Peringatan Hari Krida Pertanian menjadi kegiatan Promosi dan Publikasi Kegiatan Sektor Perikanan dan Kelautan, hal ini disebabkan pada tahun 2019 Dinas Perikanan tidak lagi menjadi leading sector penyelenggaraan Hari Krida Pertanian.

### **2.3. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

Dinas Perikanan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Semangat untuk menghasilkan kemajuan di Bidang Kelautan dan Perikanan didorong oleh motivasi yang kuat untuk menggali dan memanfaatkan potensi Kelautan dan Perikanan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi. Dinas Perikanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya diberi wewenang untuk mengelola, memanfaatkan, dan melestarikan sumber daya kelautan dan perikanan demi kesejahteraan masyarakat Tanjung Jabung Barat, khususnya masyarakat nelayan, pembudidaya, pengolah dan pemasaran ikan, serta untuk meningkatkan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sesuaidengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 65 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan pada Dinas Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah :

#### **1) Tugas Pokok**

Dinas Perikanan mempunyai Tugas Pokok melaksanakan sebgaiian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang kelautan dan perikanan.

## 2) Fungsi

Dalam melaksanakan Tugas Pokok tersebut Dinas Perikanan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang perikanan tangkap dan perikanan budidaya;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perikanan tangkap dan perikanan budidaya;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perikanan tangkap dan perikanan budidaya;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang perikanan tangkap dan perikanan budidaya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan uraian di atas, maka indikator-indikator yang ada pada kegiatan-kegiatan dalam setiap program di Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten tersebut serta tidak terlepas dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan pada bidang kelautan dan perikanan.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat dalam Tabel 2.3 dibawah ini :

**Tabel 2.3**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan**  
**Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

IKU	Satuan	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	
2	3	4	6	7	8	8	9	10	11	12	13
1) Jumlah Produksi Perikanan - Perikanan Tangkap - Perikanan Budidaya	Ton  Ton		23.798 21.734 1.934	25.112 22.790 2.102	27.766 23.929 1.985	30.725 25.125 2.084	23.798 21.734 1.934	23.798 21.734 1.934	25.112 22.790 2.102	27.766 25.069 2.417	- Produksi Perikanan Tangkap meliputi perikanan tangkap laut dan perairan umum  - Produksi perikanan budidaya meliputi budidaya kolam, tambak, mina padi
2) Jumlah Produksi Benih Ikan	Ribu Ekor		476.000	550.000	630.000	680.000	476000	476000	550.000	630.000	Meliputi produksi benih di BBI dan UPR
3) Jumlah Kelompok Masyarakat yang Menerapkan Teknologi Perikanan	Kelompok		10	10	10	10	10	10	10	10	
4) Jumlah Rumah Tangga Perikanan (RTP)	RTP		4.430	4.500	4.600	4.600	3.896	3.785	4.600	4.725	Menentukan rata pendapatan nelayan cukup sulit, karena hasil tangkapan ikan tergantung pada kondisi alam
5) Jumlah Unit Pembenihan Rakyat	Kelompok		0	1	2	2	0	0	2	2	Perlu adanya dukungan dari instansi terkait dalam mendapatkan bahan baku dan pasar
6) Jumlah Konsumsi Ikan	Kg/Kpt/Thn		32,07	32,80	33,00	33,45	33,35	33,42	33,87	33,93	Ada perubahan target pada Rencana Renstra 2016-2021, dikarenakan lingkungan yang tidak

											menentu
7) Jumlah Benih yang di Tebar (Restocking)	Ribu Ekor		50.000	60.000	80.000	80.000	48.000	65.000	80.000	80.000	Tergantung Ketersediaan benih ikan/udang di alam
8) Jumlah POKMASWAS	Kelompok		0	1	2	2	0	1	2	2	Perlu adanya Dukungan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi
9) Jumlah Kawasan Reservat/Lubuk Larangan	Kawasan		0	1	1	1	0	0	1	1	Perlu adanya dukungan masyarakat dalam pembentukan kawasan reservat/lubuk larangan

Dilihat dari table diatas kinerja Dinas Perikanan mengalami penurunan, terutama pada produksi perikanan tangkap (Laut dan Umum) yang mengalami penurunan cukup signifikan dibandingkan dengan produksi tahun 2016, penurunan produksi perikanan tangkap (laut dan umum) sebesar 1.685 Ton atau 7,27%, hal ini tidak sebanding dengan bantuan sarana dan prasarana pada tahun 2017 yang cukup kepada nelayan, ada beberapa permasalahan yang mempengaruhi turunnya produksi perikanan tangkap (laut dan umum), yaitu :

1. Lambatnya bantuan kapal penangkapan ikan terealisasi, khususnya bantuan kapal yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2017, dimana bantuan kapal penangkap ikan tersebut baru terealisasi 100% pada bulan Desember 2017.
2. Adanya indikasi telah terjadi over fishing di daerah perairan pantai.
3. Terbatasnya SDM nelayan, terutama nahkoda kapal, dimana masih banyak nahkoda kapal perikanan >5 GT yang belum memiliki sertifikat dan masih awamnya penggunaan peralatan penangkapan ikan, seperti penggunaan GPS fish finder.
4. Adanya pelarangan penggunaan jaring trawl.
5. Adanya revitalisasi alat tangkap dari KKP RI, dimana nelayan belum terbiasa dalam penggunaannya.
6. Terbatasnya stock BBM di SPBN, dimana nelayan untuk mendapatkan BBM harus memesan terlebih dahulu.

Produksi perikanan budidaya secara umum mengalami kenaikan, akan tetapi produksi perikanan budidaya pada tambak mengalami penurunan sebesar 252,95 Ton atau 37,69%, Faktor-faktor yang menghambat penurunan produksi tambak adalah :

- 1) Besarnya porsi biaya dan tingginya harga pakan, seperti sebahagian bahan baku pakan masih harus didatangkan dari negara lain (Import), usaha pakan mandiri belum berkembang, kenaikan harga ikan tidak sebanding dengan kenaikan harga pakan dan industri penyedia bahan baku pakan lokal masih sangat terbatas.
- 2) Skala budidaya ikan dalam tambak masih didominasi oleh pembudidaya tambak skala kecil (tradisional), sehingga porsi biaya tetap yang dikeluarkan menjadi besar dan sebahagian kualitas SDM pembudidaya tambak masih terbatas.
- 3) Banyaknya luasan lahan budidaya tambak yang beralih fungsi menjadi lahan pertanian maupun perkebunan.
- 4) Akses permodalan untuk usaha budidaya ikan, khususnya usaha budidaya tambak masih sangat terbatas jika dibandingkan dengan usaha pertanian yang lain.

Produksi benih ikan pada tahun 2017 ini juga mengalami penurunan sebesar 151.686Ekor atau 15,53% jika dibandingkan dengan tahun 2016 yang sebesar 976.416 ekor. Penurunan produksi benih ikan ini dipengaruhi beberapa faktor, yaitu :

1. Masih terbatasnya tenaga ahli pembenihan.
2. Kualitas air yang fluktuatif, sehingga menyebabkan terganggunya proses pemijahan ikan.
3. Belum tersusunnya SOP cara pembenihan yang baik.

Secara umum dalam menjalankan program/kegiatan Dinas Perikanan pasti terdapat kendala/hambatan yang dihadapi. Beberapa kendala/hambatan yang dihadapi dalam mencapai sasaran pembangunan dibidang perikanan dan kelautan. Hambatan dan kendala yang dihadapi tersebut antara lain:

- 1). Telah terjadinya over fishing di daerah pantai.
- 2). Terbatasnya pengetahuan dan keterampilan secara teknis baik nelayan umum petani ikan dalam budidaya usaha perikanan.
- 3). Kurangnya permodalan yang dapat disediakan dan belum dapat berkembangnya investor yang berusaha dibidang perikanan secara profesional.
- 4). Masih seringnya masyarakat yang menggunakan bahan penangkap ikan yang tidak ramah lingkungan (deskrutif).
- 5). Masih terbatasnya tenaga ahli pembenihan ikan.
- 6). Pemberdayaan Unit Pembenihan (ikan) Rakyat belum maksimal.

Berbagai solusi sebagai tindak lanjut dalam menanggulangi masalah-masalah dibidang perikanan dan kelautan, perlu mempertimbangkan agar dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

- 1). Perlu diadakannya kajian mendalam tentang potensi ikan di daerah pantai, sehingga kedepan dalam pengambilan kebijakan pembangunan perikanan dan kelautan tepat sasaran, terutama masalah penggunaan kapal penangkap ikan.
- 2). Merevitalisasi Alat Tangkap Penangkap Ikan yang dianjurkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 3). Berinovasi dalam pemilihan alat tangkap sesuai dengan daerah di KabupatenTanjungJabung Barat.
- 4). Pelatihan teknologi penangkapan ikan yang tepat guna dan tepat sasaran.
- 5). Pelatihan manajemen Koperasi/KUB yang baik dan berkelanjutan.
- 6). Melakuka perekrutan ahli pembenihan ikan.
- 7). Pembentukan kelompok pembudidaya ikan dari pemula menjadi pembudidaya yang handal.
- 8). Maksimalkan pemberdayaan kepada UPR, dengan memberikan pelatihan, sapras budidaya, dan lain lain, karena dengan diberdayakan UPR secara maksimal, maka dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan kebutuhan benih ikan dapat terpenuhi dalam daerah sendiri.
- 9). Pemberian bantuan benih ikan dan pakan yang berkualitas.
- 10). Menjalin kerjasama dengan instansi lain yang berhubungan dengan Urusan Kelautan dan Perikanan.



## **2.4. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan**

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, masih dijumpai adanya beberapa isu-isu strategi yang menjadi hambatan dan tantangan, yaitu :

### **2.4.1.1. Sekretariat**

- Penempatan personil yang belum disesuaikan dengan kompetensi, keahlian dan latar belakang pendidikan;
- Pendelegasian wewenang yang belum jelas sesuai dengan TUPOKSI-nya, akan mengakibatkan pertanggung jawaban yang kurang memadai dan menimbulkan pelaksanaan kegiatan yang tumpang-tindih;
- Pembiayaan Kegiatan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang masih terbatas.

### **2.4.1.2. Bidang Perikanan Budidaya**

- BBI sebagai tempat kajian, penelitian teknologi perikanan, Pembenihan Ikan sebagai tempat kawasan sesuai spesifik perikanan perlu dikembangkan;
- Belum terpenuhinya benih ikan dalam daerah, sehingga sampai saat ini masih mendatangkan benih dari luar daerah;
- Kurang termotivasinya masyarakat dalam usaha budidaya ikan;
- Tercemarnya sumber air sebagai media budidaya, sehingga produksi ikan budidaya kurang maksimal;
- Daya saing produk perikanan budidaya yang masih rendah, dimana produk perikanan masih kalah tenar dengan produk pangan lainnya, seperti daging sapi dan daging ayam;
- Pasar domestik masih kurang berkembang, dimana hasil produksi perikanan budidaya masih sangat kesulitan dipasarkan;

- Akses permodalan yang masih rendah, dimana masih banyak lembaga keuangan daerah maupun nasional yang mau memberikan pinjaman modal untuk pembudidaya ikan;
- Kualitas pembudidaya rata-rata masih rendah, dimana pekerjaan pembudidaya merupakan pekerjaan informal, sehingga pekerjaan ini bukan merupakan pekerjaan pokok.
- Masih kurangnya pemberdayaan/pelatihan budidaya ikan kepada masyarakat;
- Masih rendahnya pemberdayaan UPR, sehingga belum ada UPR baru yang terbentuk;
- Mahalnya pakan ikan yang ada di pasaran;
- Masih minimnya tenaga ahli yang kompeten di bidang budidaya.

#### **2.4.1.3. Bidang Perikanan Tangkap**

- Kapal penangkapan ikan yang digunakan oleh nelayan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagian besar masih menggunakan perahu tradisional dengan dayung dan atau motor kecil, sehingga penangkapan ikan masih terbatas di sekitar pantai;
- Masih minimnya kesadaran masyarakat nelayan akan kelestarian lingkungan;
- Sarana dan prasarana dermaga pendaratan ikan hasil tangkapan yang belum optimal, sehingga nelayan masih jarang yang mendaratkan hasil tangkapannya di PPI yang telah dibangun oleh pemerintah.
- Daya saing produk perikanan tangkap yang masih rendah, dimana produk perikanan tangkap masih kalah tenar dengan produk pangan lainnya, seperti daging sapi dan daging ayam;
- Masih kurangnya inovasi ragam olahan hasil perikanan, sehingga masih banyak dipasaran produk yang dijual masih dalam bentuk ikan hasil tangkapan;
- Masih rendahnya pengetahuan masyarakat pesisir akan kewirausahaan dan kemandirian;

- Lembaga keuangan yang melayani kepentingan usaha rakyat (mitra usaha), baik perbankan maupun lembaga keuangan bukan bank masih sangat terbatas;
- Belum optimalnya penyusunan rencana pengelolaan wilayah pesisir dan laut, sehingga berdampak pada rusaknya wilayah pesisir dan laut;
- Masih rendahnya pengetahuan masyarakat akan kelestarian lingkungan pesisir dan laut;
- Belum optimalnya pemberdayaan pada kelompok nelayan dan pembudidaya ikan.
- Sarana dan prasarana pemasaran dan pengolahan hasil perikanan yang belum memadai;
- Masih minimnya pengetahuan SDM packaging dan pengolahan hasil perikanan;
- Masih sulitnya pengurusan izin usaha perikanan lebih dari 30 GT dari pusat;
- Pemasaran hasil produksi, terutama komoditi hasil perikanan masih belum maksimal.
- Belum optimalnya pengawasan sumberdaya Kelautan dan Perikanan, sehingga masih banyak pelanggaran terhadap pemanfaatan sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
- Masih minimnya pengetahuan SDM akan peraturan perundang-undangan tentang sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
- Masih tingginya pelanggaran dalam pemanfaatan sumberdaya Kelautan dan Perikanan;

#### **2.4.2. Kondisi yang Diinginkan**

Untuk mewujudkan apa yang telah ditetapkan dalam program kerja dan kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka diharapkan dapat mampu mewujudkan hal-hal sebagai berikut :

#### **2.4.2.1. Sekretariat**

- Meningkatnya koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain dalam penanganan kewenangan;
- Sesuaianya penempatan personildengan kompetensi keahlian dan latar belakang pendidikan;
- Meningkatnya rasa tanggung jawab SDM sesuai dengan TUPOKSI, sehingga pelaksanaan program/kegiatan tidak umpang tindih dan monoton;
- Meningkatkan pelaporan di Bidang Kelautan dan Perikanan;
- Meningkatkan pendanaan dalam pembangunan di Bidang Kelautan dan Perikanan.

#### **2.4.2.2. Bidang Perikanan Budidaya**

- Meningkatkan pengetahuan SDM dalam bidang perikanan, khususnya di bidang budidaya, sehingga tercapai sasaran yang diinginkan;
- Harus adanya pemberdayaan yang optimal untuk dalam produksi benih ikan secara mandiri;
- Harus adanya inovasi dalam mengembangkan produk hasil perikanan budidaya, berupa diversifikasi hasil olahan;
- Harus adanya kebijakan khusus dalam peningkatan akses modal untuk pembudidaya ikan;
- Perlu adanya penambahan kelompok usaha budidaya ikan mandiri;
- Adanya pelatihan kepada masyarakat pembudidaya ikan dalam membuat pakan sendiri, sehingga permasalahan mahalnya pakan ikan bisa teratasi;
- Meningkatkan tenaga ahli yang kompeten di bidang budidaya;

### 2.4.2.3. Bidang Perikanan Tangkap

- Meningkatkan kapal penangkapan ikan yang dapat beroperasi dilepas pantai (Laut Natun dan Laut China Selatan);
- Meningkatkan pengetahuan masyarakat akan pentingnya akan pelestarian alam, sehingga permasalahan minimnya hasil tangkapan dapat teratasi;
- Perbaikan sarana dan prasarana dermaga pendaratan ikan (PPI) harus dilakukan, sehingga nelayan banyak yang mendaratkan hasil tangkapannya di dermaga yang telah dibangun oleh Pemerintah.
- Harus adanya inovasi dalam mengembangkan produk hasil perikanan tangkap, berupa diversifikasi hasil olahan;
- Meningkatkan pengetahuan masyarakat pesisir akan kewirausahaan dan kemandirian;
- Meningkatkan lembaga keuangan yang melayani kepentingan usaha rakyat (mitra usaha) baik perbankan maupun lembaga keuangan bukan bank, sehingga masyarakat mudah untuk mendapatkan mudal usaha;
- Tersusunnya rencana pengelolaan wilayah pesisir dan laut, sehingga kedepan arah kebijakan pembangunan pesisir dan laut tidak tumpang tindih dengan kepentingan lain;
- Meningkatkan pengetahuan masyarakat akan kelestarian lingkungan pesisir dan laut, sehingga masyarakat punya tanggung jawab akan lingkungannya;
- Meningkatkan pemberdayaan pada kelompok nelayan dan pembudidaya ikan.
- Penyediaan sarana dan prasarana pemasaran dan pengolahan hasil Kelautan dan Perikanan yang memadai;
- Meningkatkan pengetahuan SDM akan packaging dan pengolahan hasil perikanan;
- Adanya kemudahan pengurusan izin usaha perikanan lebih dari 30 GT dari pusat, sehingga hasil produksi perikanan tangkap di Kabupaten Tanjung Jabung Barat meningkat;

- Meningkatkan sarana dan prasarana pemasaran komoditi hasil perikanan.
- Meningkatkan pengawasan sumberdaya Kelautan dan Perikanan, sehingga pelanggaran-pelanggaran terhadap pemanfaatan sumberdaya Kelautan dan Perikanan dapat ditekan;
- Meningkatkan pengetahuan SDM akan peraturan perundang-undangan, sehingga dalam pengambilan kebijakan atau keputusan sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya Kelautan dan Perikanan.

## **2.5. Review Terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD**

RKPD Perubahan adalah salah satu acuan bagi setiap perangkat daerah dalam penyusunan Renja OPD, selain RENSTRA OPD. RKPD disusun dalam rangka sinkronisasi pembangunan daerah. Oleh karenanya rancangan awal RKPD seyogyanya diketahui secara umum oleh seluruh OPD untuk dapat disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan OPD terkini.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat kemudian mereview rancangan awal Perubahan RKPD yang disandingkan dengan kebutuhan OPD dengan hasil bahwa program dan kegiatan yang terdapat dalam Perubahan Renja Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sudah tercantum semua dalam rancangan Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Pada Perubahan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 ini telah disusun sesuai dengan analisa kebutuhan yang ada. dan tentu tidak luput dari beberapa pergeseran maupun perubahan angka pagu indikatif. Tetapi untuk usulan program dan kegiatan secara keseluruhan tidak berubah.



## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional**

Mengacu pada amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pada prinsip penyelenggaraan otonomi daerah yang seyogyanya harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat, Maka Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengajukan program/kegiatan ke kementerian yang terkait sebagai wujud partisipasi dalam mendukung program Pemerintah baik daerah maupun pusat, dalam hal ini mensejahterakan masyarakat nelayan, pembudidaya serta masyarakat pengolah dan pemasar hasil Kelautan dan Perikanan.

Kebijakan pembangunan Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam rangka mendukung prioritas pembangunan nasional yaitu ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan. Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

- 1) Pengembangan agribisnis dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi perikanan guna mendukung peningkatan produksi Kelautan dan Perikanan;
- 2) Peningkatan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat perikanan menuju keamanan produk Kelautan dan Perikanan; dan



- 3) Peningkatan Pengelolaan sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang optimal dan berkelanjutan.

### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan Dinas Perikanan**

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu tahun. Berdasarkan pernyataan visi dan misi dinas ditetapkanlah tujuan Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

1. Meningkatkan produksi dan produktifitas Kelautan dan Perikanan;
2. Meningkatkan kualitas masyarakat perikanan untuk pengembangan usaha perikanan yang Tangguh;
3. Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya Kelautan dan Perikanan secara optimal dan berkelanjutan.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis yang akan dicapai secara nyata melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan sehingga dapat memberi arah terhadap alokasi sumber daya yang telah dipercayakan kepada instansi yang bersangkutan.

Berdasarkan pernyataan tujuan dinas ditetapkanlah sasaran Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

1. Meningkatnya produksi Kelautan dan Perikanan.
2. Meningkatnya pembinaan dan pendampingan masyarakat perikanan dalam mengembangkan usaha perikanan yang Tangguh.
3. Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya Kelautan dan Perikanan secara optimal dan berkelanjutan.

### **3.3. Program dan Kegiatan**

Program adalah rangkaian kegiatan yang disusun secara sistematis berdasarkan isu-isu strategis sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD yang dilaksanakan secara bertahap dan

berkesinambungan. Dengan demikian, maka program untuk tahun 2019 ini, penyusunan program pembangunan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat akan terus berlanjut dan diprioritaskan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Program menjadi instrumen untuk menentukan sasaran yang diproyeksikan dengan memanfaatkan sumberdaya dan sumber dana tertentu. Program serta kegiatan-kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam kurun waktu 1 (satu) tahun ini dapat dikelompokkan sebagai berikut :

## **A. PROGRAM RUTIN**

### **1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Program ini diarahkan untuk peningkatan Administrasi Perkantoran

Program tersebut diwujudkan dalam kegiatan :

- Penyediaan jasa sarat menyurat;
- Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik;
- Penyediaan jasa administrasi keuangan
- Penyediaan jasa kebersihan kantor;
- Penyediaan alat tulis kantor;
- Penyediaan barang cetak dan penggandaan;
- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- Penyediaan makanan dan minuman;
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

### **2. Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur**

Program ini diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana kebutuhan aparatur.

Program tersebut diwujudkan dalam kegiatan :

- Pengadaan perlengkapan gedung kantor;
- Pengadaan peralatan gedung kantor;
- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor;

### **3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

Program ini diarahkan untuk meningkatkan kedisiplinan Aparatur.

Program tersebut diwujudkan dalam kegiatan :

- Pengadaan pakaiandinas beserta perlengkapannya.

### **4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur**

Program ini diarahkan untuk meningkatkan pengetahuan Apartur.

Program tersebut diwujudkan dalam kegiatan :

- Pengembangan SDM

### **5. Program Peningkatan Pengembangan system Pelaporan, Capaian Kinerja dan keuangan**

Program ini diarahkan untuk meningkatkan perencanaan dan pelaporan yang tepat dan akurat serta meningkatkan keabsahan data-data Bidang Kelautan dan Perikanan yang terbaru.

Program tersebut diwujudkan dalam kegiatan :

- Pengumpulan dan pengolahan data-data statistic Kelautan dan Perikanan.
- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kegiatan;

## **B. PROGRAM TEKNIS**

### **1. Program Pengembangan Budidaya Perikanan**

Program ini diarahkan untuk meningkatkan produksi perikanan dari hasil budidaya ikan.

Program tersebut diwujudkan dalam kegiatan :

- 1) Penyediaan Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan;
- 2) Pengembangan Budidaya Air Tawar dan Air Payau;
- 3) Pengembangan Sumberdaya Manusia Perikanan Budidaya;
- 4) Pengembangan Balai Benih Ikan (BBI) Pembengis dan UPBAP Tj. Labu;
- 5) Pengawasan Hama Penyakit Ikan dan Lingkungan;
- 6) Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan POKDAKAN;
- 7) Pengembangan Kawasan Budidaya Air Tawar dan Air Payau; dan
- 8) Pengembangan Budidaya Air Tawar dan Air Payau (DAK)

## **2. Program Pengembangan Perikanan Tangkap**

Program ini diarahkan untuk pengembangan usaha perikanan tangkap di laut dan Perairan Umum.

Program tersebut diwujudkan dalam kegiatan :

- 1) Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap;
- 2) Pemberdayaan dan Perlindungan Nelayan; dan
- 3) Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap (DAK).

## **3. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan**

Program ini diarahkan untuk Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

Program tersebut diwujudkan dalam kegiatan :

- 1) Pembinaan Usaha dan Pemasaran Hasil Perikanan;
- 2) Promosi dan Publikasi Kegiatan Sektor Perikanan dan Kelautan;

## **4. Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan**

Program ini diarahkan untuk Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Program tersebut diwujudkan dalam kegiatan :

1. Pembinaan Kelembagaan dan Peningkatan SDM Pelaku Usaha Perikanan;
2. Pembinaan dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan dan SDI.

Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 Dan Perubahan Tahun 2019 dapat dilihat dalam Tabel 3.1 sebagai berikut :

**Tabel 3.1.**  
**Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan**  
**Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 dan**  
**Perubahan Tahun 2019**

KODE	RENCANA PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RENJA 2019					CATATAN PENTING	RENJA PERUBAHAN 2019		PENANGGUNG JAWAB
			LOKASI	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Meningkatnya Tata Kelola Perkantoran yang baik, transparan dan akuntable	Diskan	%	80	790.760.635	APBD II		80%	854.030.635	
01	Penyediaan Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Diskan	Bulan	12	3.000.000	APBD II		12 Bulan	3.000.000	SEKRETARIAT
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Diskan	Bulan	12	53.760.000	APBD II		12 Bulan	53.760.000	SEKRETARIAT
07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	Diskan	Bulan	12	106.355.000	APBD II		12 Bulan	106.355.000	SEKRETARIAT
08	Penyediaan Jasa Kebersihan	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor dan Peralatan Kebersihan	Diskan	Bulan	12	7.508.900	APBD II		12 Bulan	7.508.900	SEKRETARIAT
10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Diskan	Bulan	12	59.384.735	APBD II		12 Bulan	59.384.735	SEKRETARIAT
11	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Diskan	Bulan	12	15.860.000	APBD II		12 Bulan	15.860.000	SEKRETARIAT
12	Penyediaan komponen instalasi / penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Diskan	Bulan	12	1.692.000	APBD II		12 Bulan	1.692.000	SEKRETARIAT
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Media Cetak dan Peraturan Perundang-undangan	Diskan	Bulan	12	11.000.000	APBD II		12 Bulan	11.000.000	SEKRETARIAT
17	Penyediaan makan dan minuman	Tersedianya makan dan minum rapat	Diskan	Bulan	12	4.200.000	APBD II		12 Bulan	4.200.000	SEKRETARIAT

	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Diskan	Bulan	12	528.000.000	APBD II		12 Bulan	591.270.000	SEKRETARIAT
02		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Diskan</b>	<b>%</b>	<b>80</b>	<b>334.610.000</b>	<b>APBD II</b>		<b>100</b>	<b>365.110.000</b>	
	09	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Diskan	Unit	5	44.000.000	APBD II		5	44.000.000	SEKRETARIAT
	13	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Diskan	Unit	5	20.000.000	APBD II		5	50.500.000	SEKRETARIAT
	20	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Diskan	%	2	14.000.000	APBD II		100	14.000.000	SEKRETARIAT
	22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	Diskan	Unit	29	240.060.000	APBD II		32	240.060.000	SEKRETARIAT
	26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Diskan	Unit	32	16.550.000	APBD II		45	16.550.000	SEKRETARIAT
03		<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Jumlah Pakaian Dinas yang disediakan</b>	<b>Diskan</b>	<b>Stell</b>	<b>64</b>	<b>108</b>	<b>APBD II</b>		<b>64</b>	<b>25.550.000</b>	
	02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Diskan	Stell	64	108	APBD II		64	25.550.000	SEKRETARIAT
05		<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur</b>	<b>Jumlah Aparatur yang mengikuti pendidikan formal/non formal</b>	<b>Diskan</b>	<b>OK</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>APBD II</b>		<b>10</b>	<b>48.150.000</b>	<b>SEKRETARIAT</b>
	05	Pengembangan SDM	Pengiriman aparatur perikanan untuk mengikuti kursus singkat dan bintek	Diskan	OK	10	5	APBD II		10	48.150.000	SEKRETARIAT
06		<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Persentase Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Laporan Statistik Tahunan</b>	<b>Diskan</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>APBD</b>		<b>100</b>	<b>43.998.000</b>	<b>SEKRETARIAT</b>
	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Pelaporan LKj	Diskan	Dokumen	6	5	APBD II		6	20.498.000	SEKRETARIAT
	17	Pengumpulan dan pengolahan data-data statistik perikanan	Tersedianya Laporan Statistik Tahunan	Diskan	Buku	10	10	APBD II		10	23.500.000	SEKRETARIAT

20		Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	Tanjung Jabung Barat	Ton	2.085	1.186.671.000	APBD II		2.150	1.136.061.000	BUDIDAYA
	12	Penyediaan Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan	Kec. Tungkal Ilir, Kec. Bram Itam, Kec. Seberang Kota, Kec. Kuala Betara Kec. Betara, Kec. Senyerang, Kec. Tebing Tinggi, Kec. Tungkal Ulu, Merlung, Kec. Muara Papalik, Kec. Batang Asam, Kec. Renah Mendaluh.	Unit/Paket	12	70.000.000	APBD II		10	20.500.000	BUDIDAYA
	13	Pengembangan Budidaya Air Tawar dan Air Payau	Jumlah Pengadaan Benih Ikan dan Pakan Ikan	Kec. Tebing Tinggi dan Kec. Merlung	Ekor/Kg	360.000/7.000	121.400.000	APBD II		360.000/7.000	148.620.000	BUDIDAYA
	14	Pengembangan Sumberdaya Manusia Perikanan Budidaya	Jumlah Pembudidaya yang mendapatkan pelatihan dan bimbingan teknis pembudidaya ikan yang baik an berstandard	Kec. Tungkal Ilir, Kec. Bram Itam, Kec. Seberang Kota, Kec. Kuala Betara Kec. Betara, Kec. Senyerang, Kec. Tebing Tinggi, Kec. Tungkal Ulu, Merlung, Kec. Muara Papalik, Kec. Batang Asam, Kec. Renah Mendaluh.	Orang	300	93.100.000	APBD II		300	48.100.000	BUDIDAYA
	15	Pengembangan Balai Benih Ikan (BBI) Pembengis dan UPBAP Tj. Labu	Jumlah produksi benih ikan	Ds. Pembengis dan Tj. Labu	Ekor	680.000	356.545.000	APBD II		710.000	328.215.000	BUDIDAYA
	16	Pengawasan Hama Penyakit Ikan dan Lingkungan	Terlaksananya Monotoring Hama dan Penyakit Ikan	Kec. Tungkal Ilir, Kec. Bram Itam, Kec. Seberang Kota, Kec. Kuala Betara Kec. Betara, Kec. Senyerang, Kec. Tebing Tinggi, Kec. Tungkal Ulu, Merlung, Kec. Muara Papalik, Kec. Batang Asam, Kec. Renah Mendaluh.	Bulan	12	24.551.000	APBD II		12	24.551.000	BUDIDAYA



17	Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan POKDAKAN	Jumlah Pembudidaya Ikan yang mendapatkan pemberdayaan dan legalitas Pembudidaya ikan	Kec. Tungkal Ilir, Kec. Bram Itam, Kec. Seberang Kota, Kec. Kuala Betara, Kec. Senyerang, Kec. Tebing Tinggi, Kec. Tungkal Ulu, Merlung, Kec. Muara Papalik, Kec. Batang Asam, Kec. Renah Mendaluh.	Orang	60	28.075.000	APBD II		60	28.075.000	BUDIDAYA	
	18	Pengembangan Kawasan Budidaya Air Tawar dan Air Payau	Terlaksananya pengembangan kawasan budidaya ikan	Kec. Tebing Tinggi	Lokasi	3	44.000.000	APBD II		3	89.000.000	BUDIDAYA
	19	Pengembangan Budidaya Air Tawar dan Air Payau (DAK)	Terlaksananya Bantuan Budidaya Kolam Tepal	Kec. Tungkal Ilir, Kec. Merlung, Kec. Betara, Kec. Batang Asam, Kec. Renah Mendaluh, Kec. Tungkal Ulu, Kec. Seberang Kota, Kec. Kuala Betara		7 Paket	449.000.000	DAK		7 Paket	449.000.000	BUDIDAYA
21	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Tanjung Jabung Barat	Ton	25.125	2.076.832.000	APBD II		26.381	2.201.372.000	TANGKAP	
	Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana dan Prasarana Penangkapan Ikan	Kec. Tungkal Ilir, Kec. Kuala Betara, Kec. Bram Itam dan Kec. Tungkal Ulu	Unit/Piece	46/700	1.181.400.000	APBD II		46/700	1.305.940.000	TANGKAP	
	08	Pemberdayaan dan Perlindungan Nelayan	Jumlah Masyarakat Nelayan yang mendapatkan Pembinaan dan Perlindungan Nelayan	Kec. Tungkal Ilir dan Kec. Seberang Kota, Kec. Kuala Betara dan Kec. Pengabuan	Kelompok	5	86.200.000	APBD II		5	86.200.000	TANGKAP

22		Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap (DAK)	Tersedianya Sarana Penangkapan Ikan	Kec. Tungkal Ilir, Kec. Kuala Betara, Kec. Bram Itam dan Kec. Tungkal Ulu	Piece/Paket	12 Piece / 30 Paket	809.232.000	DAK		12 Piece / 30 Paket	809.232.000	TANGKAP
		Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Jumlah Produk Pengolahan Hasil Perikanan	13 Kecamatan	Ton	927,5	138.350.000	APBD II		935,03	124.350.000	TANGKAP
	10	Pembinaan Usaha dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan yang Mendapatkan Sosialisasi Perizinan dan Pemantauan Perizinan Usaha Perikanan	Kec. Tungkal Ilir, Kec. Seberang Kota, Kec. Kuala Betara, Kec. Pengabuan, Kec. Betara, Kec. Bram Itam, Kec. Tebing Tinggi, Kec. Batang Asam, Kec. Merlung, Kec. Tungkal Ulu, Kec. Renah Mendaluh	Orang	60	70.275.000	APBD II		60	70.275.000	TANGKAP
	12	Promosi dan Publikasi Kegiatan Sektor Perikanan dan Kelautan	Pelaksanaan Promosi dan Publikasi Kegiatan Kelautan dan Perikanan	Kuala Tungkal, Luar Kabupaten dan Luar Provinsi Jambi	Kali	6	68.075.000	APBD II		6	54.075.000	TANGKAP
	23	Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Meningkatnya Lokasi Pelestarian sumberdaya perikanan	13 Kecamatan	Lokasi	11	208.320.000	APBD II		12	208.320.000	TANGKAP

		Pembinaan Kelembagaan dan Peningkatan SDM Pelaku Usaha Perikanan	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Pelatihan Nelayan Skala Kecil	Kec. Tunggal Ilir, Kec. Kuala Betara dan BBPPI Semarang	Orang	150	96.670.000	APBD II		200	96.670.000	TANGKAP	
14		Pembinaan dan Pelestarian Sumberdaya Ikan	Jumlah Benih yang di Tebar (Restocking)	Kec. Tunggal Ilir, Kec. Renah Mendaluh dan Kec. Tebing Tinggi	Ribu Ekor	80.000	111.650.000	APBD II		80.000	111.650.000	TANGKAP	
<b>JUMLAH</b>								<b>4.735.543.851</b>				<b>5.006.941.635</b>	

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERUBAHAN DINAS PERIKANAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2019**

Program Dinas Perikanan merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perikanan. Rencana program prioritas beserta 46 indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan Dinas Perikanan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Dinas Perikanan. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perikanan.

Pencapaian 46 indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (outcome) sebenarnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat namun juga oleh sumber pendanaan lainnya (APBN, APBD Provinsi Jambi, dan sumber-sumber pendanaan lainnya).

Rencana Kerja dan Pendanaan Perubahan Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 dapat dilihat dalam Tabel 4.1

**Tabel 4.1**  
**Rencana Kerja dan Pendanaan Perubahan Dinas Perikanan Tahun 2019**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif pada RENJA 2019	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif pada RENJA Perubahan 2019	Bertambah/ Berkurang	%
<b>02:01:01</b>	<b>Kelautan dan Perikanan</b>				
<b>2.01.01.01</b>	<b>Program pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>790.760.635</b>	<b>854.030.635</b>	<b>63.270.000</b>	<b>8,00</b>
2.01.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	3.000.000	3.000.000	0	0,00
2.01.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	53.760.000	53.760.000	0	0,00
2.01.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	106.355.000	106.355.000	0	0,00
2.01.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	7.508.900	7.508.900	0	0,00
2.01.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	59.384.735	59.384.735	0	0,00
2.01.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	15.860.000	15.860.000	0	0,00
2.01.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1.692.000	1.692.000	0	0,00
2.01.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	11.000.000	11.000.000	0	0,00
2.01.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	4.200.000	4.200.000	0	0,00
2.01.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	528.000.000	591.270.000	63.270.000	11,98
<b>2.01.01.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>334.610.000</b>	<b>365.110.000</b>	<b>30.500.000</b>	<b>9,12</b>
2.01.01.02.09	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	44.000.000	44.000.000	0	0,00
2.01.01.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	20.000.000	50.500.000	30.500.000	152,50
2.01.01.02.12	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	14.000.000	14.000.000	0	0,00
2.01.01.02.20	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	240.060.000	240.060.000	0	0,00
2.01.01.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	16.550.000	16.550.000	0	0,00
2.01.01.02.32	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	0	0	0	0,00
<b>2.01.01.03</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>25.550.000</b>	<b>25.550.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
2.01.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	25.550.000	25.550.000	0	0,00
<b>2.01.01.05</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>27.500.000</b>	<b>48.150.000</b>	<b>20.650.000</b>	<b>75,09</b>
2.01.01.05.05	Pengembangan SDM	27.500.000	48.150.000	20.650.000	75,09

<b>2.01.01.06</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>43.998.000</b>	<b>43.998.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
2.01.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	20.498.000	20.498.000	0	0,00
2.01.01.06.17	Pengumpulan dan Pengolahan Data Statistik Perikanan	23.500.000	23.500.000	0	0,00
<b>2.01.01.20</b>	<b>Program pengembangan budidaya perikanan</b>	<b>1.186.671.000</b>	<b>1.136.061.000</b>	<b>-50.610.000</b>	<b>-4,26</b>
2.01.01.20.04	Penyediaan sarana dan Prasarana Budidaya Ikan	70.000.000	20.500.000	-49.500.000	-70,71
2.01.01.20.05	Pengembangan Budidaya Air Tawar dan Air Payau	121.400.000	148.620.000	27.220.000	22,42
2.01.01.20.06	Pengembangan Sumberdaya Manusia Perikanan Budidaya	93.100.000	48.100.000	-45.000.000	-48,34
2.01.01.20.07	Pengembangan Balai Benih Ikan (BBI) Pembengis dan UPBAP Tj. Labu	356.545.000	328.215.000	-28.330.000	-7,95
2.01.01.20.08	Pengawasan Hama Penyakit Ikan dan Lingkungan	24.551.000	24.551.000	0	0,00
2.01.01.20.09	Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan POKDAKAN	28.075.000	28.075.000	0	0,00
2.01.01.20.10	Pengembangan Kawasan Budidaya Air Tawar dan Air Payau	44.000.000	89.000.000	45.000.000	102,27
2.01.01.20.11	Pengembangan Budidaya Air Tawar dan Air Payau (DAK)	449.000.000	449.000.000	0	0,00
<b>2.01.01.21</b>	<b>Program pengembangan perikanan tangkap</b>	<b>2.076.832.000</b>	<b>2.201.372.000</b>	<b>124.540.000</b>	<b>6,00</b>
2.01.01.21.06	Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap	1.181.400.000	1.305.940.000	124.540.000	10,54
2.01.01.21.07	Pemberdayaan dan Perlindungan Nelayan	86.200.000	86.200.000	0	0,00
2.01.01.21.08	Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap (DAK)	809.232.000	809.232.000	0	0,00
<b>2.01.01.23</b>	<b>Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan</b>	<b>138.350.000</b>	<b>124.350.000</b>	<b>-14.000.000</b>	<b>-10,12</b>
2.01.01.23.02	Pembinaan Usaha dan Pemasaran Hasil Perikanan	70.275.000	70.275.000	0	0,00
2.01.01.23.03	Promosi dan Publikasi Kegiatan Sektor Perikanan dan Kelautan	68.075.000	54.075.000	-14.000.000	-20,57
<b>2.01.01.25</b>	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian sumber daya Kelautan dan Perikanan</b>	<b>208.320.000</b>	<b>208.320.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
2.01.01.25.01	Pembinaan Kelembagaan dan Peningkatan SDM Pelaku Usaha Perikanan	96.670.000	96.670.000	0	0,00
2.01.01.25.02	Pembinaan dan Pelestarian Sumberdaya Ikan	111.650.000	111.650.000	0	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>4.832.591.635</b>	<b>5.006.941.635</b>	<b>174.350.000</b>	<b>3,61</b>

## **BAB IV PENUTUP**

Dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung jabung Barat selanjutnya menjadi dasar perumusan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) Tahun 2019. Tujuan penyusunan Perubahan Renja dimaksud adalah untuk merumuskan prioritas program dan kegiatan serta pagu indikatifnya yang akan dilaksanakan pada perubahan Tahun 2019 serta mengacu pada perencanaan tahun kedua Perubahan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung jabung Barat Tahun 2016-2021. Perubahan tersebut didasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan Renja dan pencapaian indikator RPJMD sampai dengan Mei Tahun 2019.

Selain itu, mengingat waktu pelaksanaan program dan kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung jabung Barat Tahun 2019 sangat terbatas, hanya pada Triwulan IV Tahun 2019, maka perlu dilakukan upaya-upaya koordinatif dan pengendalian secara cermat dan berkualitas untuk semua kegiatan baik kegiatan dalam penetapan maupun perubahan. Sehingga semua kegiatan dapat selesai dilaksanakan sesuai rencana serta memenuhi capaian indikator baik dalam RPJMD maupun Renstra.

Kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam Renstra namun tidak tercantum dalam renja dikarenakan keterbatasan kemampuan keuangan daerah, indikator kinerja telah tercapai pada tahun sebelumnya, adanya penyesuaian nama program dan kegiatan demi keselarasan indikator kinerja maupun perubahan jadwal rencana pelaksanaan kegiatan. Adapun kegiatan yang tercantum dalam Renja namun tidak terdapat dalam Renstra dimungkinkan dengan kriteria dalam rangka mempercepat capaian target sasaran Renstra OPD, adanya kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas nasional yang mendukung percepatan pembangunan serta capaian target dari kegiatan yang telah dilaksanakan belum terpenuhi.

Dengan disusunnya Perubahan Renja Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini dapat diketahui capaian target dari kegiatan yang telah dilaksanakan ditahun sebelumnya dan tahun berjalan sampai dengan Mei Tahun 2019. Sehingga capaian kinerja setiap tahunnya yang terangkum dalam Renstra dapat diketahui dan dilakukan percepatan pencapaian target pada tahun selanjutnya jika belum tercapai.

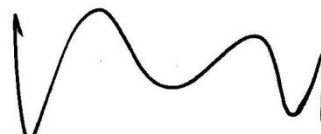
Sangat disadari bahwa Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 ini belum sempurna. Sehubungan dengan itu masukan dari berbagai pihak untuk penyempurnaan Renja Perubahan sangat diharapkan sehingga Renja Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk tahun-tahun selanjutnya akan menjadi lebih baik.

***“Perencanaan yang baik bukan berarti segala-galanya, Tetapi  
Tanpa perencanaan yang baik, segala-galanya menjadi tidak berarti”***

Kuala Tungkal,

2019

**Pit. KEPALA DINAS**



**Ir. H. ERWIN**

**Pembina Utama Muda**

**NIP. 19611016 199303 1 001**